

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa Pelaksanaan anggaran di Satuan Kerja Biro Sumber Daya Manusia menunjukkan beberapa permasalahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Adapun kesimpulan secara terperinci terhadap 2 aspek penelitian, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Aspek Prosedur Penyusunan

- a. Dalam penyusunan anggaran arah kebijakan penyusunan anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia mengacu kepada perencanaan anggaran dan pedoman penyusunan anggaran BPK RI pada Biro Sumber Daya Manusia tahun anggaran 2022 No.P-002.01/X.4/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan Sasaran Kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Masih terdapatnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan-kebijakan kedalam penyusunan anggaran itu sendiri. Antara lain kebijakan pemerintah terkait penanggulangan pandemi, sangat berpengaruh terhadap alokasi anggaran kepada masing-masing bagian di Biro Sumber Daya Manusia, hal ini berdampak pada keterlambatan penyampaian dokumen dan berkurangan kebutuhan anggaran sasaran kinerja kegiatan.
- b. Masih terdapatnya keterlambatan data dukung dokumen perencanaan anggaran. Hal ini disebabkan oleh, beberapa faktor antara lain, para penyusun anggaran tidak memperhatikan kesesuaian data dukung dengan rencana kebutuhan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan, kesibukan para

penyusunan anggaran yang lebih fokus terhadap pemenuhan data primer dalam penyusunan anggaran seperti dokumen Kerangka Acuan kerja, Rencana Kerja Anggaran, Rencana Penarikan Dana, dan Rencana Umum Pengadaan. Sehingga hal ini pula, yang menyebabkan dalam penyusunan anggaran sering kali melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan.

- c. Masih kurangnya koordinasi antar bagian dalam penyusunan anggaran yang menyebabkan dalam penyusunan anggaran sering kali melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan.
- d. Masih terdapatnya kekurangan dokumen penyusunan anggaran yang dalam penyampaian kepada Biro Keuangan.
- e. Masih terdapatnya perencanaan yang kurang memadai sehingga pada pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak terakomodir dalam dokumen anggaran.

2. Aspek Realisasi Anggaran

- a. Masih terdapatnya pelaksanaan kegiatan yang mundur dari perencanaan yang seharusnya. Beberapa penyebab terjadinya hal tersebut antara lain belum siapnya kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan anggaran ditahun berjalan dan proses revisi yang sedang berlangsung, hal ini kerap terjadi pada triwulan pertama menyebabkan efek domino sampai triwulan ke IV.
- b. Kebijakan pemerintah pusat pada tahun berjalan sangat sulit diprediksi pada saat penyusunan oleh karena itu revisi anggaran tidak bisa dihindarkan. Sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat karena proses revisi anggaran yang sedang berlangsung.
- c. Dari aspek sumber daya manusia masih terdapatnya tumpang tindihnya pekerjaan antara penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan tupoksi masing-masing bagian yang mengakibatkan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan menjadi kurang efektif dan efisien.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang dapat penulis sampaikan diatas terhadap Pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Biro Sumber Daya Manusia Tahun anggaran 2022. Penulis memberikan beberapa masukan dan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada tahap perencanaan dalam hal ini penyusunan anggaran Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku KPA melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para pejabat eselon III selaku kepala bagian beserta dengan LO keuangan dan Staf LO dengan melaksanakan rapat teknis penyusunan anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang timbul seperti halnya keterlambatan penyampaian dokumen, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan tarik-menarik anggaran antar bagian.
2. Sebaiknya, dilakukannya sinkronisasi jadwal kegiatan dan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Sehingga baik pada saat penyusunan maupun pelaksanaannya Biro Sumber Daya Manusia dapat meminimalisir penumpukan kegiatan di akhir tahun.
3. Sebaiknya Biro Sumber Daya Manusia membuat unit khusus atau menunjuk beberapa pegawai yang mempunyai tugas pokok pengelolaan APBN pada Biro Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bastian, Indra (2002), Sistem Akuntansi Sektor Publik, Jakarta:Salemba Empat

Bungin, P. D. H. B. (2019) Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. PT Fajar Interpretama Mandiri.

Lembaga Administrasi Negara (2022), Pedoman penulisan Skripsi, Jakarta: Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset

Haryanto, et al. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hasibuan Malayu SP, (2003), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara

Suparmoko, (2000), Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta, BBFE.

Sugiono. 2014. Cara Mudah Menyusun Sripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung: Alfabeta

B. Artikel Jurnal

Anisa, I. Z. (2017), Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Pelaksanaan Anggarn pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, 84-101.

- Gagola. Et. Al. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tulaud, jurnal riset akuntansi dan auditing. 108-117.
<https://Scribd.com/jjs.v8idl.15530>
- Malahayati, et. al. (2015), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh, 11-49.
- Putri, C. T. (2014), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu
<https://scribd.com/asjdi.28349.dld>
- Putri, Yniarta, & Prayudi (2017), Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan Anggaran.
<https://scribd.com/jjs.v9281d.3334>
- Widianingrum, Kustono, & Suryaningsih, (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo, 194-208.
- Sudarwait, et. al. (2016), Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja di Akhir Tahun (Studi Kasus Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado), 129-138.
- Yumiati, et. al. (2016). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Serapan Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Aceh, 43-49.
- Sudarwait, et. al. (2016), Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja di Akhir Tahun (Studi Kasus Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado), 129-138.

C. Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Peraturan Menteri Keuangan No.208/PMK.02/2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran pasal 3

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

D. Dokumen-Dokumen Lainnya

Nota Dinas No.534/ND/X/05/2021 tanggal 12 Mei 2021 perihal Indikasi Anggaran per Satker Berdasarkan Pagu Indikatif TA 2022